

ABSTRAK

Perdebatan seputar ambiguitas prosedur sensor dan kurangnya transparansi sangat berpengaruh pada presentasi akhir film. Hal ini menyangkut hak dan kebebasan berekspresi dan berpendapat baik dari sisi pembuat film maupun penonton. Pengaruh kebijakan sensor dalam penelitian ini akan terlihat dari segi pembatasan penunjukan beberapa unsur dalam film, masalah proses sensor, tidak adanya perlindungan terhadap karya, dan gangguan terhadap sisi bisnis hasil sensor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Kebijakan Sensor Film di Indonesia terhadap industri film lokal. Dengan tidak adanya parameter yang jelas dalam mengklasifikasikan film yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang sensor, mengakibatkan praktik sensor subyektif karena sangat bergantung pada persepsi aparat sensor dalam menafsirkan pedoman sensor secara luas. Dengan itu, pada akhirnya pembuat film lah yang akan menanggung beban akibat keputusan sensor ini. Fokus penelitian selanjutnya dapat berpusat pada keterbatasan kebebasan berekspresi, praktik sensor film, dan juga parameter klasifikasi usia penonton yang dalam penelitian ini dianggap masih belum sempurna. Jika hal ini akan dilanjutkan, maka dasar hukum dan peraturan yang mengatur klasifikasi umur harus ditinjau ulang dan dikaji implementasinya.

Kata kunci: sensor, kebebasan berekspresi, kreativitas, pembuatan film

ABSTRACT

The debate surrounding the ambiguity of the censorship procedure and lack of transparency is very influential on the film's final presentation. This appeals to the rights and freedoms of expression and opinion both from the side of the filmmaker and the audience. The influence of the censorship policy in this study will be seen in terms of restrictions on the appointment of several elements in the film, problems with the censorship process, no protection of works, and disruption to the business side of censorship results. This research aims to analyse the impact of the Film Censorship Policy in Indonesia on the local film industry. With the absence of clear parameters in classifying films contained in laws and government regulations regarding censorship, results in subjective censorship practices because it heavily depends on the perceptions of the censorship apparatus in interpreting broad censorship guidelines. With that possible input, in the end, it is the filmmaker who will bear the brunt of the results of this censorship decision. The focus of further research can centre on the limitations of freedom of expression, the practice of film censorship, and also the parameters of the audience's age classification which in this study are still considered imperfect. If it is to be continued, the legal basis and regulations governing the age classification must be reviewed and its implementation to be assessed.

Keywords: censorship, freedom of expression, creativity, filmmaking